

**ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
(APBD) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA  
SURABAYA**

**Silvia Damayanti**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[silviadamayanti406@gmail.com](mailto:silviadamayanti406@gmail.com)

**I Made Suparta**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[madesuparta@untag-sby.ac.id](mailto:madesuparta@untag-sby.ac.id)

**ABSTRACT**

This study aims to examine the effect of operational expenditure and capital expenditure on the Human Development Index (HDI) in Surabaya City, motivated by the fact that although HDI continues to increase every year, operational and capital expenditures actually show fluctuating trends. A quantitative approach was employed using multiple linear regression analysis on time-series data from 2011 to 2025, obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of Surabaya City and the SKID portal. The analysis was conducted using EViews software. The results show that, simultaneously, operational expenditure and capital expenditure have a significant effect on HDI in Surabaya City. Partially, operational expenditure has a negative and significant effect on HDI, indicating that an increase in operational spending is associated with a decline in HDI. Meanwhile, capital expenditure shows a negative but insignificant effect, meaning that higher capital spending has not yet been able to significantly improve human development. These findings suggest that the local government should reconsider the composition of operational expenditure and redirect capital expenditure toward infrastructure that directly supports education and health sectors to enhance public welfare.

**Keywords:** *Operational Expenditure, Capital Expenditure, Human Development Index, Surabaya.*

**A. PENDAHULUAN**

Kesejahteraan masyarakat selalu menjadi target utama dalam setiap proses pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun, mengukur keberhasilan suatu daerah tidak bisa hanya mengandalkan angka pertumbuhan ekonomi karena kualitas sumber daya manusia juga memegang peranan yang sangat penting. Salah satu indikator yang paling sering digunakan untuk menilai kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena indikator ini merangkum tiga aspek mendasar, yaitu kesehatan yang ditandai dengan umur panjang, tingkat pendidikan yang mencerminkan pengetahuan, serta kemampuan ekonomi untuk hidup layak. Menurut Giarti & Susilowati (2024), apabila IPM suatu wilayah tinggi maka dapat dipastikan masyarakatnya hidup lebih sejahtera, ditandai dengan akses yang baik

terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan yang memadai, serta daya beli yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Melalui kerangka otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah di tingkat lokal kini memiliki wewenang untuk mengelola keuangannya sendiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Cara pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanjanya menjadi faktor kunci yang dapat mendorong atau justru menghambat peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Dua komponen belanja yang secara teoritis memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM adalah Belanja Operasional dan Belanja Modal. Belanja operasional diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan layanan publik, termasuk gaji pegawai, pembelian barang dan jasa, serta berbagai program sosial. Adapun, belanja modal mencerminkan investasi pemerintah daerah melalui pembangunan sarana publik dan aset tetap, yang nantinya diharapkan bisa menggerakkan ekonomi serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar.

**Tabel 1 Indeks Pembangunan Kota Surabaya 2011-2025**

<b>Tahun</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>
2011	77,87
2012	78,05
2013	78,51
2014	78,87
2015	79,47
2016	80,38
2017	81,07
2018	81,74
2019	82,22
2020	82,76
2021	82,94
2022	83,32
2023	83,99
2024	84,69
2025	85,65

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2026

Berdasarkan Tabel 1, IPM Kota Surabaya terus merangkak naik setiap tahunnya tanpa mengalami penurunan, meskipun sempat terjadi pandemi COVID-19 yang melumpuhkan banyak sektor. Tren peningkatan yang konsisten ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Surabaya berjalan dengan baik. Di balik kenaikan yang stabil tersebut, berbagai program unggulan pemerintah kota seperti Pahlawan Ekonomi, Pejuang Muda, Health Space, Sahabat Keluarga, serta program beasiswa ikatan dinas turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Meskipun IPM terus meningkat, realisasi belanja operasional dan belanja modal di Kota Surabaya menunjukkan dinamika yang berbeda. Sepanjang periode 2011 hingga 2025, belanja operasional cenderung meningkat dari tahun ke tahun, walaupun pada 2023 sempat menurun akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah kota pascapemulihan pandemi. Sementara itu, belanja modal menunjukkan fluktuasi yang lebih tajam, dengan penurunan drastis pada tahun 2020 dan 2021 akibat kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. Kondisi ini berpotensi membatasi efektivitas APBD dalam mendorong peningkatan IPM, karena belanja operasional yang didominasi oleh belanja pegawai dan belanja rutin administratif umumnya memiliki dampak tidak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, belanja modal yang fluktuatif berisiko menghambat pembangunan infrastruktur publik yang mendukung akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Berbagai penelitian terdahulu tentang pengaruh belanja operasional dan belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia telah dilakukan di berbagai daerah dengan hasil yang beragam. Sebagian penelitian menunjukkan bahwa kedua jenis belanja tersebut dapat berkontribusi terhadap peningkatan IPM apabila dikelola secara efektif dan berorientasi pada sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, penelitian lain menemukan bahwa pengaruhnya tidak signifikan atau bahkan cenderung negatif, tergantung pada komposisi belanja, kualitas pelaksanaan program, serta karakteristik fiskal dan ekonomi masing-masing daerah. Perbedaan hasil ini mengindikasikan adanya kesenjangan penelitian. Penelitian yang secara khusus menelaah pengaruh belanja operasional dan belanja modal terhadap IPM di Kota Surabaya dengan periode pengamatan hingga tahun 2025 masih sangat terbatas, padahal Surabaya sebagai kota metropolitan memiliki dinamika fiskal dan pola pembangunan yang berbeda dengan daerah lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pengaruh belanja operasional dan belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Surabaya selama periode 2011–2025. Temuan penelitian ini diharapkan mampu menyajikan bukti empiris yang lebih relevan secara kontekstual terhadap efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta berfungsi sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi belanja publik secara lebih efektif dan berorientasi pada pembangunan manusia.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Kebijakan fiskal daerah menempati posisi strategis dalam upaya pemerintah daerah untuk mengarahkan dinamika perekonomian sekaligus memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Peran tersebut diwujudkan melalui mekanisme perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi sebagai perangkat pokok dalam mengatur dan mengelola keuangan. Teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Charles Mills Tiebout (1956) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Wallace E. Oates (1972) dalam bukunya *Fiscal Federalism* menyatakan bahwa desentralisasi fiskal yang ditandai dengan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diyakini mampu meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya

publik, karena pemerintah daerah dianggap lebih memahami kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Dalam sistem desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri melalui APBD, termasuk kewenangan dalam mengalokasikan belanja operasional dan belanja modal sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

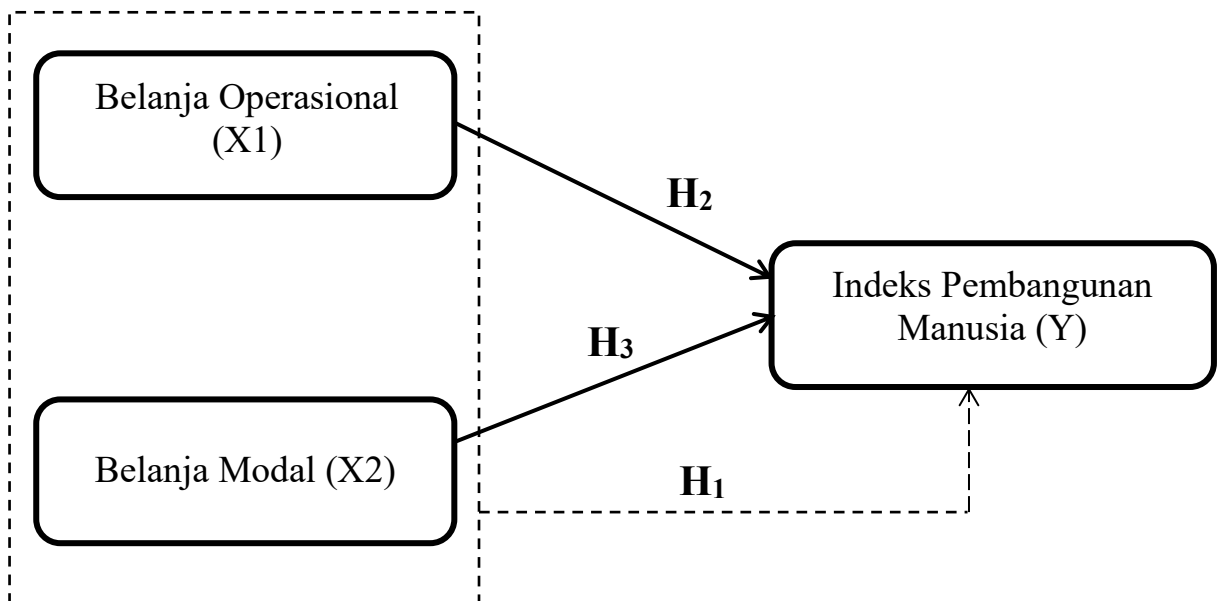
Salah satu komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sehari-hari adalah belanja operasional. Belanja operasional merupakan pengeluaran daerah yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan serta pelayanan publik sehari-hari, yang manfaatnya tidak melebihi satu periode akuntansi atau satu tahun anggaran (Sholikhah & Priyono, 2022). Belanja operasional terdiri atas empat komponen utama, yaitu belanja pegawai (gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, serta tambahan penghasilan lainnya bagi ASN daerah), belanja barang dan jasa (pembelian barang habis pakai, biaya perjalanan dinas, pemeliharaan ringan, serta pengadaan jasa), belanja hibah (pengeluaran kepada lembaga atau organisasi tertentu), serta belanja bantuan sosial (Bantuan Langsung Tunai, Program Keluarga Harapan, dan Bantuan Pangan Non Tunai).

Selain belanja operasional, komponen belanja lain yang tidak kalah penting dalam mendukung pembangunan daerah adalah belanja modal. Belanja modal merupakan bagian dari belanja daerah yang dialokasikan untuk kegiatan pengadaan aset tetap dengan masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran. Nilai aset tetap dalam belanja modal mencakup biaya perolehan atau pembangunan ditambah seluruh pengeluaran terkait hingga aset siap digunakan (Karmila et al., 2021). Pengeluaran yang termasuk dalam belanja modal dibagi menjadi lima kelompok, yaitu belanja untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Penyaluran belanja modal yang tepat sasaran akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama pembangunan gedung sekolah dan puskesmas yang berpengaruh terhadap peningkatan IPM (Kakasih et al., 2018).

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, digunakan *Indeks Pembangunan Manusia* (IPM) sebagai salah satu indikator pengukuran. *Indeks Pembangunan Manusia* (IPM) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai capaian pembangunan serta tingkat kemajuan suatu daerah. IPM pertama kali dipublikasikan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990. IPM diartikan sebagai ukuran yang merangkum pencapaian agregat suatu wilayah yang diukur melalui tiga dimensi pokok pembangunan manusia, yakni kesehatan, pendidikan, dan taraf hidup yang layak (Badan Pusat Statistik, 2025). Pengukuran dimensi kesehatan dilakukan dengan menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir sebagai indikator utama. Pada dimensi pendidikan, pengukuran didasarkan pada Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Selanjutnya, dimensi standar hidup layak diukur melalui Pengeluaran per Kapita Riil yang telah disesuaikan (Ukra et al., 2022). Ketiga dimensi tersebut dihitung dan dirangkum menjadi satu nilai indeks yang berkisar

antara 0 hingga 100, di mana semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, semakin sejahtera masyarakatnya.

Berbagai penelitian terdahulu tentang pengaruh belanja operasional dan belanja modal terhadap IPM menunjukkan hasil yang beragam. Sebagian penelitian menemukan bahwa belanja operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, seperti yang ditunjukkan oleh Pradana (2018), Firmansyah & Wasil (2024), Sasti & Latrini (2019), Fauzi & Widarjo (2021) serta Zebua & Adib (2024). Sementara itu, penelitian lain menemukan pengaruh positif yang tidak signifikan, sebagaimana hasil temuan Djajuli et al. (2023). Ketidakkonsistenan juga terlihat pada pengaruh belanja modal terhadap IPM. Sejumlah studi, seperti yang dilakukan oleh Umiyati et al. (2017), Fauzan (2025), Khikmah et al. (2018), Fauzi & Widarjo (2021), serta Tarumingkeng et al. (2018), menyimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Berbeda dengan penelitian sebelumnya Pratama & Ariza (2024) serta Sasti & Latrini (2019) menemukan bahwa belanja modal memberikan pengaruh positif terhadap IPM, meskipun pengaruh tersebut tidak signifikan. Temuan yang berbeda ini mengisyaratkan bahwa dampak belanja operasional maupun belanja modal terhadap IPM dapat bervariasi antarwilayah karena dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, karakteristik daerah, kebijakan pemerintah daerah, serta keberadaan program-program pendukung di masing-masing daerah.



**Gambar 1 Kerangka Konseptual**

- H<sub>1</sub>: Terdapat pengaruh signifikan secara simultan belanja operasional dan belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Surabaya.
- H<sub>2</sub>: Terdapat pengaruh signifikan belanja operasional terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Surabaya.
- H<sub>3</sub>: Terdapat pengaruh signifikan belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Surabaya.

### **C. METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hubungan kausal antara belanja operasional dan belanja modal terhadap *Indeks Pembangunan Manusia* (IPM) di Kota Surabaya. IPM digunakan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, sementara belanja operasional dan belanja modal menjadi representasi dari kebijakan fiskal pemerintah daerah yang tercermin dalam APBD. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder berbentuk time series tahunan dari 2011 hingga 2025, dengan jumlah pengamatan sebanyak 15 tahun. Data IPM diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, sementara data belanja operasional dan belanja modal bersumber dari laporan realisasi APBD yang dipublikasikan melalui portal SKID (Sistem Keuangan dan Investasi Daerah). Penelitian ini menggunakan analisis data metode regresi linier berganda dengan pendekatan time series untuk menguji pengaruh belanja operasional dan belanja modal terhadap IPM, baik secara simultan maupun parsial. Pemilihan regresi linier berganda didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Seluruh proses pengolahan dan analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak EViews, yang memungkinkan estimasi parameter regresi, pengujian signifikansi, serta interpretasi hasil analisis dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Teknik pengolahan dan analisis data ini dipilih untuk mengetahui pengaruh dari dua variabel independen, yaitu Belanja Operasional ( $X_1$ ) dan Belanja Modal ( $X_2$ ) terhadap variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia ( $Y$ ).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y : Indeks Pembangunan Manusia
- $X_1$  : Belanja Operasional
- $X_2$  : Belanja Modal
- $\alpha$  : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2$  : Koefisien Regresi
- $\varepsilon$  : Error

**D. HASIL DAN PEMBAHASAN**  
**Hasil**

**Tabel 2 Analisis Regresi Linier Berganda**

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 05/23/26 Time: 19:26

Sample: 2011 2025

Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.193440	0.274357	29.86417	0.0000
BO	-0.000442	4.78E-05	-9.246629	0.0000
BM	-0.000259	0.000131	-1.981090	0.0710
R-squared	0.916520	Mean dependent var	5.199333	
Adjusted R-squared	0.902607	S.D. dependent var	0.843983	
S.E. of regression	0.263389	Akaike info criterion	0.346485	
Sum squared resid	0.832483	Schwarz criterion	0.488095	
Log likelihood	0.401365	Hannan-Quinn criter.	0.344976	
F-statistic	65.87383	Durbin-Watson stat	0.826282	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil olah data Eviews 13, 2026

Berdasarkan Tabel 2, model analisis persamaan regresi linear berganda yang terbentuk dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

$$Y = 8.193440 - 0.000442X_1 - 0.000259X_2$$

Sehingga dari persamaan regresi linier berganda di atas dapat dijelaskan bahwa:

- Konstanta sebesar 8,193440, yang berarti bahwa jika nilai Belanja Operasional (X1) dan Belanja Modal (X2) masing-masing sebesar 0 (nol), maka nilai IPM (Y) di Kota Surabaya sebesar 8,193440 poin indeks.
- Koefisien regresi Belanja Operasional sebesar -0,000442, yang berarti bahwa jika variabel Belanja Modal (X2) dianggap konstan, maka setiap peningkatan Belanja Operasional akan menurunkan IPM sebesar 0,000442 poin indeks. Artinya, semakin besar alokasi belanja operasional, maka IPM akan semakin turun.
- Koefisien regresi Belanja Modal sebesar -0,000259, yang berarti bahwa jika variabel Belanja Operasional (X1) dianggap konstan, maka setiap peningkatan Belanja Modal akan menurunkan IPM sebesar 0,000259 poin indeks. Artinya, semakin besar alokasi belanja modal, maka IPM akan semakin turun.

### **Uji F (Uji Simultan)**

Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan nilai F-statistic sebesar 65,87383 dengan nilai probabilitas 0,000000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menandakan bahwa Belanja Operasional (BO) dan Belanja Modal (BM) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Surabaya. Artinya, kombinasi antara belanja operasional dan belanja modal yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya selama periode 2011–2025 mampu secara bersama-sama menjelaskan variasi peningkatan atau penurunan IPM.

### **Uji T (Uji Parsial)**

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, variabel Belanja Operasional (BO) memperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,000442 dengan nilai *t*-hitung sebesar -9,246629 dan probabilitas sebesar 0,0000. Nilai probabilitas yang berada di bawah tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa Belanja Operasional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Kota Surabaya. Artinya, setiap tambahan Belanja Operasional sebesar 1 miliar rupiah berkorelasi dengan penurunan IPM sebesar 0,000442 poin indeks.

Sebaliknya, variabel Belanja Modal (BM) menunjukkan koefisien regresi sebesar -0,000259 dengan nilai *t*-hitung -1,981090 serta probabilitas 0,0710. Karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka Belanja Modal berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap IPM di Kota Surabaya. Dengan demikian, setiap kenaikan Belanja Modal sebesar 1 miliar rupiah berasosiasi dengan penurunan IPM sebesar 0,000259 poin indeks.

### **Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,916520 atau 91,65% menunjukkan bahwa variasi yang terjadi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen, yaitu Belanja Operasional (BO) dan Belanja Modal (BM), sedangkan sisanya sebesar 8,35% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian seperti pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat pendidikan dan kualitas SDM, investasi swasta, program bantuan sosial, serta kebijakan fiskal lainnya.

### **Pembahasan**

#### **Pengaruh Belanja Operasional dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa belanja operasional dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Indeks Pembangunan Manusia* (IPM) di Kota Surabaya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sinergi antara kedua jenis belanja daerah tersebut berperan dalam mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kota Surabaya. Sinergi antara pembiayaan kegiatan rutin pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur publik menjadi faktor penting dalam upaya peningkatan IPM. Dengan kata lain, keberhasilan peningkatan IPM tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi belanja operasional atau belanja modal secara terpisah, tetapi juga oleh keseimbangan dan sinergi antara keduanya dalam kebijakan fiskal daerah.

#### **Pengaruh Belanja Operasional Terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Analisis data yang dilakukan memperlihatkan bahwa belanja operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Indeks Pembangunan Manusia* (IPM)

di Kota Surabaya. Hal tersebut mencerminkan adanya hubungan yang berlawanan arah, di mana peningkatan belanja operasional diikuti dengan penurunan IPM. Temuan ini mengindikasikan bahwa komposisi belanja operasional yang didominasi oleh belanja pegawai dan belanja rutin administratif memiliki daya dorong yang rendah terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Belanja pegawai yang terlalu besar tidak menghasilkan multiplier effect yang kuat terhadap peningkatan angka harapan hidup, harapan lama sekolah, dan standar hidup layak yang menjadi dimensi IPM. Selain itu, kebijakan refocusing anggaran selama pandemi COVID-19 juga turut mempengaruhi efektivitas belanja operasional, di mana dana yang semula dialokasikan untuk kegiatan rutin penunjang IPM dialihkan untuk penanganan kesehatan dan bantuan sosial.

### **Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa belanja modal memiliki pengaruh negatif, tetapi tidak signifikan terhadap *Indeks Pembangunan Manusia* (IPM) di Kota Surabaya. Kondisi ini dapat dijelaskan oleh beberapa hal. Pertama, belanja modal selama periode pengamatan cenderung diarahkan pada pembangunan infrastruktur fisik, antara lain jalan, jembatan, dan gedung perkantoran. Sebaliknya, pengeluaran untuk pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, seperti sekolah, puskesmas, dan rumah sakit, masih memperoleh porsi yang lebih rendah. Jenis infrastruktur ini memang penting, namun manfaatnya tidak secara langsung dirasakan dalam peningkatan dimensi kesehatan dan pendidikan yang menjadi komponen utama IPM. Kedua, dampak belanja modal terhadap pembangunan manusia memerlukan waktu yang tidak sebentar atau sering disebut dengan time lag. Manfaat dari pembangunan infrastruktur baru akan terasa setelah beberapa tahun kemudian, misalnya ketika akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan menjadi lebih mudah karena infrastruktur yang memadai. Karena periode pengamatan penelitian ini hanya sampai tahun 2025, kemungkinan efek positif dari belanja modal belum sepenuhnya terlihat secara signifikan dan baru akan dirasakan pada tahun-tahun berikutnya.

### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan hasil pengujian hipotesis serta uraian pembahasan yang telah disampaikan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Belanja operasional dan belanja modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM, menunjukkan bahwa kebijakan belanja daerah yang terintegrasi mampu berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kota Surabaya.
2. Belanja operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, menunjukkan bahwa kenaikan belanja operasional berimplikasi pada penurunan IPM akibat dominasi belanja pegawai dan belanja rutin administratif.
3. Belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM, menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal belum mampu

meningkatkan IPM secara signifikan karena alokasinya lebih banyak untuk infrastruktur fisik dan dampaknya bersifat jangka panjang.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2025). *Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya*.
- Charles Mills Tiebout. (1956). A Pure Theory of Local Expenditures. *Journal of Political Economy*, 64(5), 416–424.
- Djajuli, I., Siregar, H., & Sarma, M. (2023). Analisis Pengaruh Komponen Belanja Langsung Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Peningkatan Ipm Kota Bogor. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 11(1), 34–43.
- Fauzan, A. (2025). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kampar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 5388–5401.
- Fauzi, H. H., & Widarjo, W. (2021). Financial Performance and Human Development with Control of Regional Characteristics. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 3(2), 190–201.
- Firmansyah, A. H., & Wasil, M. (2024). Pengaruh Belanja Pemerintah dan PDRB terhadap Peningkatan IPM di Indonesia Timur. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 5(1), 54–65.
- Giarti, Q. N., & Susilowati, D. (2024). ANALISIS KESEJAHTERAAN DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(2), 240–252.
- Kakasih, R. A., Kawung, G. M. V., & Tumangkeng, S. Y. L. (2018). ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROPINSI SULAWESI UTARA. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(02), 124–134.
- Karmila, D., Tinangon, J. J., & Gamaliel, H. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi atas Belanja Modal pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 9(1), 668–678.
- Khikmah, Z., Sarfiah, S. N., & Prasetyanto, P. K. (2018). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap IPM di Pulau Sulawesi Tahun 2011–2018. *Directory Journal of Economic*, 2(2), 1127–1142.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Pradana, M. (2018). Alokasi Belanja Pemerintah Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Develop*, 2(1).
- Pratama, A., & Ariza, A. (2024). Dampak Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sekadau. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5), 1338–1350.
- Sasti, I. A. T. P., & Latrini, M. Y. (2019). Pengaruh Alokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1632.
- Sholikhah, A. L., & Priyono, N. (2022). Analisis Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 1–12.
- Tarumingkeng, W. A., Rumat, V. A., & Rotinsulu, T. O. (2018). Pengaruh Belanja Modal dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal*

- Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(2), 82–95.
- Ukra, M. G., Nusrang, M., & Poerwanto, B. (2022). Regresi Panel Spasial untuk Pemodelan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota se-Kalimantan. *Journal of Statistics and Its Application on Teaching and Research*, 4(2), 70–78.
- Umiyati, E., Amril, & Zulfanetti. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. *Jurnal Sains Sosiohumaniora*, 1(1), 29–37.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2025). *2025 Global Multidimensional Poverty Index (MPI): Overlapping Hardships: Poverty and Climate Hazards*.
- Zebua, W. F., & Adib, N. (2024). *Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Kualitas Pembangunan Manusia*. 2, 306–312.